



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**UNIT KERJA** : DINAS PERHUBUNGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I GDE WAYAN SAMSI GUNARTA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 710276

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.812.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m<sup>2</sup>/42 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 756.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m<sup>2</sup>/45 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 756.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m<sup>2</sup>/59 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
4. Tanah Seluas 3.700 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 42 m<sup>2</sup>/42 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 421.000.000

1. MOBIL, KIA SORENTO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, FORD ECOSPORT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, PIAGIO LX150 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOTOR, YAMAHA XEON Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 15.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 178.204.570



F. HARTA LAINNYA	Rp.	81.934.760
Sub Total	Rp.	4.508.139.330
III. HUTANG	Rp.	529.996.346
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.978.142.984

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.